

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang terkait dengan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Prosedur Pengeluaran kas berupa Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang sah telah dilakukan sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundangan dimana ada pemisahan tugas yang jelas dan adanya pertanggungjawaban untuk setiap pengeluaran kas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengeluaran kas telah didukung dengan dokumen-dokumen terkait yaitu Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Pertanggungjawaban(SPJ) disertai dengan dokumen transaksi yang melengkapi prosedur pengeluaran kas.

## 6.2. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah.

1. Sistem dan prosedur pengeluaran kas telah sesuai dengan Undang-Undang, sebaiknya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT tetap mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan tersebut dan sebisa mungkin menghindari kelalaian atau niat yang tidak baik dari oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada dengan lebih meningkatkan pengawasan khususnya dalam pengeluaran kas.
2. Memperbaharui aturan atau pedoman sistem dan prosedur pengeluaran kas yang digunakan sebagai acuan sekarang yaitu Permendagri No. 21 Tahun 2011 dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dwi Martani, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hall, James A., 2009. *Accounting Information System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hall, James A., 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta. Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kadir, Abdul. 2014. "pengenalan sistem informasi edisi revisi". Andi: Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2019. "Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah" PENATAUSAHAAN DAN PERBENDAHARAAN DAERAH. Jakarta.
- Lahay. Olivia. 2013. Analisis Pelaksanaan System Dan Prosedur Kas pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. Jurna EMBA. <http://www.unsrat.ac.id> diakses pada tanggal 30 April 2017.
- Ratmono, Dwi & Mahfud Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sharode, William A. and Dan Voich, Jr. (1974). *Organizational and Manajement: Basic System Concepts*. Malaysia: Irwin Book Company.
- Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*." Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Saputra, Andrew (2013), Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Sulawesi Utara,
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 Tahun 2006 tentang pedomman pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.